

Katalog : 2104028.3308

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER KABUPATEN MAGELANG 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER KABUPATEN MAGELANG

2021



ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER KABUPATEN MAGELANG 2021

Katalog : 2104028.3308
Nomor Publikasi : 33080.2249
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 58 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar Kover oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ilustrasi Kover :

-

Sumber Ilustrasi :
freepik.com;

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dicetak Oleh :
TM Advertising & Percetakan

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

Kata Pengantar

Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kabupaten Magelang 2021 menyajikan data mengenai laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan komposisi penduduk, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keikutsertaan dalam pemerintahan serta politik, dan berbagai indikator yang berkaitan.

Sumber data utama yang digunakan adalah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, Potensi Desa (Podes) 2021, Sensus Penduduk (SP), Proyeksi Penduduk Interim Sensus Penduduk 2020.

Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, gambar serta analisis deskriptif yang mudah dipahami. Semoga publikasi ini dapat memberikan gambaran terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten Magelang, serta bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan manusia berbasis gender di Jawa Tengah pada masa mendatang.

Kota Mungkid, Desember 2022

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Magelang
Kepala,



[Signature]
Toto Desanto, S.Si, M.Si

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Sistematika Penulisan	5
1.4 Sumber Data	5
Bab 2 Metodologi	
2.1 Konsep Pembangunan Gender	9
2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Gender	11
2.3 Perubahan Interpretasi	12
2.4 Konsep Pemberdayaan Gender	13
Bab 3 Gambaran Umum Gender di Kabupaten Magelang	
3.1 Komposisi Penduduk	18
3.2 Kesehatan	20
3.3 Pendidikan	24
3.4 Tenaga Kerja	26
3.5 Kesempatan Dalam Pemerintahan	29
Bab 4 Capaian Pembangunan Gender di Kabupaten Magelang	
4.1 IPG Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu	36
4.2 Perkembangan IPG Kabupaten Magelang	38
4.3 Capaian IPG Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu ...	43
Bab 5 Capaian Pemberdayaan Gender	
5.1 IDG Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu	47
5.2 Perkembangan IDG Kabupaten Magelang	48
Bab 6 Kesimpulan	55
Daftar Pustaka	57

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator Pembentukan IDG	14
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2021.....	25
Tabel 3.2 Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021.....	31
Tabel 4.1 Komponen IPG Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2021	37
Tabel 4.2 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kedu menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	43
Tabel 4.7 Angka IPG dan IPM Menurut Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2021	44

Daftar Gambar

	Halaman
Bab 3. Gambaran Umum Gender di Kabupaten Magelang	
Gambar 3.1	Gambar 3.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Tahun 2021 19
Gambar 3.2	Piramida Penduduk Kabupaten Magelang 2021 19
Gambar 3.3	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan 2021 21
Gambar 3.4	Angka Kesakitan Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan 2021 22
Gambar 3.5	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021 24
Gambar 3.6	Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di Kabupaten Magelang, Tahun 2017-2021 26
Gambar 3.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 27
Gambar 3.8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2021 28
Gambar 3.9	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang Agustus 2021 29
Gambar 3.10	Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2021 30
Bab 4. Capaian Pembangunan Gender di Kabupaten Magelang	
Gambar 4.1	IPG Kabupaten Magelang di Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2021 37
Gambar 4.2	Perkembangan IPG, IPM Perempuan dan IPM Laki-laki Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021 38
Gambar 4.3	Perkembangan UHH menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021 39

Halaman

Gambar 4.4	Perkembangan HLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2021	40
Gambar 4.5	Perkembangan RLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021	41
Gambar 4.6	Perkembangan Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021.....	42
Bab 5. Capaian Pemberdayaan Gender		
Gambar 5.1	IDG Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2021	48
Gambar 5.2	IDG Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021	48
Gambar 5.3	Komponen IDG di Kabupaten Magelang Tahun 2021	49
Gambar 5.4	Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2021	49
Gambar 5.5	Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2021	50
Gambar 5.6	Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2021	51



Ringkasan Eksekutif

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesenjangan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia, khususnya melihat kesenjangan dan akses perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender. Hal ini sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Magelang tahun 2021 mencapai 91,89. Meskipun nilai IPG Kabupaten Magelang semakin meningkat, namun nilai IPG masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Selaras dengan IPG Kabupaten Magelang yang tercatat lebih rendah dibanding Provinsi Jawa

Tengah, IDG Kabupaten Magelang sebesar 69,64 juga lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 71,64.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang tahun 2021 tercatat 91,89 meningkat dibanding IPG Kabupaten Magelang tahun 2020 yang tercatat 91,81. Penjabarannya, IPM laki-laki di Kabupaten Magelang sebesar 74,69 dan perempuan sebesar 68,63. Sejak tahun 2013 hingga 2021, IPM laki-laki di Kabupaten Magelang sudah berstatus 'tinggi' (nilainya diatas 70), sedangkan IPM perempuan masih berstatus 'sedang' (antara 60 sampai dengan 70). Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Magelang masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2011 hingga sekarang.

Pemberdayaan gender di Kabupaten Magelang pada periode 2011 – 2021 tidak selalu mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2011-2021, pencapaian IDG Kabupaten Magelang paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 71,21. IDG Kabupaten Magelang tahun 2021 menurun hanya mencapai 69,64. IDG pada periode tahun 2018-2021 cenderung menurun dibandingkan dengan tren pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan belum adanya perbaikan keadaan pemberdayaan gender di Kabupaten Magelang.

Pencapaian hasil baik IPG maupun IDG, menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antargender.

BAB I

PENDAHULUAN

Beberapa Indeks Untuk Mengukur Kesetaraan Gender

Tahun 2021

IPM

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

70,12

IPG

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

91,89

IDG

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

69,64



Pendahuluan

LATAR BELAKANG

Dari beberapa literatur, konsep gender secara umum diartikan bukan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep gender adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya, peran kaum perempuan juga dapat terlihat dari peran reproduksi, peran produktif, dan peran sosial kemasyarakatan (Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003).

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, isu-isu terkait gender cukup menarik perhatian terutama pada masalah diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Diskriminasi terjadi dari berbagai aspek kehidupan yaitu berupa perilaku masyarakat yang berasal dari suatu aturan, sejarah, adat, norma, dan struktur masyarakat. Diskriminasi gender akan melahirkan kesenjangan gender, yang akan menghilangkan hak-hak perempuan atas kesempatan dan kendali pada sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik.

Sebagai pihak yang melahirkan dan mendidik generasi penerus, perempuan harus dilindungi hak-hak hidupnya. Bentuk perlindungan hak-hak tersebut adalah menerima perlakuan yang adil terhadap aspek-aspek dasar manusia, yaitu dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang melahirkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi sangat mutlak.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan oleh berbagai pihak. Masyarakat dunia melalui Majelis Umum PBB telah mencetuskan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap permasalahan gender, dan diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya yang berkaitan

mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga mengadopsi berbagai kebijakan yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui GBHN, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Saat ini juga sedang dibahas mengenai Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak serta merta masalah-masalah terkait gender akan hilang. Sebagian perempuan masih menjadi obyek yang harus menderita, seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, dan lain-lain. Disamping itu, kesempatan perempuan dalam menyalurkan aspirasinya melalui perlemen juga masih minim. Padahal perempuan telah berperan banyak dalam pembangunan nasional dan pewujudan kesejahteraan. Hal ini seiring dengan pendapat dari UNDP, bahwa mengabaikan aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada factor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indicator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat

(semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

TUJUAN

Publikasi ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG).

SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini terdiri dari 6 bab, yaitu :

- Bab I : menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, sistematika penulisan, dan sumber data.
- Bab II : menjelaskan mengenai konsep IPG dan IDG
- Bab III : menjelaskan mengenai gambaran umum gender di Kabupaten Magelang
- Bab IV : menjelaskan mengenai capaian pembangunan gender di Kabupaten Magelang
- Bab V : menjelaskan mengenai capaian pemberdayaan gender di Kabupaten Magelang
- Bab VI : menjelaskan mengenai kesimpulan dari penulisan publikasi ini.

SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipilah menurut laki-laki dan perempuan. Data Sensus Penduduk 2010 digunakan untuk menghitung angka harapan hidup. Sedangkan data Susenas digunakan untuk menghitung angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang

disesuaikan. Sementara data Sakernas digunakan untuk mendapatkan angka upah serta jumlah angkatan kerja sebagai penunjang penghitungan pendapatan per kapita yang disesuaikan.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI



**UMUR PANJANG
&
HIDUP SEHAT**



PENGETAHUAN

**STANDAR
HIDUP LAYAK**





Metodologi

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antargender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

KONSEP PEMBANGUNAN GENDER

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin serta berbagai hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender mulai diperkenalkan oleh ilmuwan sosial. Konsep perbedaan pada maksud gender tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan, dapat merugikan baik pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, kesetaraan gender merupakan hak yang sewajarnya terjadi agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek, yaitu pemberdayaan, partisipasi, dan kerjasama, keamanan, keberlanjutan, dan kesetaraan, (Sen, 1989). Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber

daya manusia laki-laki dan perempuan hampir sama secara kuantitas. Jika terjadi kesetaraan gender dalam hal hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama, niscaya akan memperkuat kemampuan suatu wilayah untuk berkembang. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan SDGs yang ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kesetaraan ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan, dan variabel sosial ekonomi lainnya, selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Searah dengan target SDGs, meski tidak dicantumkan secara khusus, pemerintah dalam program Nawacita juga turut mencanangkan beberapa kebijakan gender yang tersirat dalam 3 agenda Nawacita, diantaranya:

1. Cita ke-2 yaitu “Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”, kebijakan yang termaktub adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan manusia.
2. Cita ke-4, yaitu “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi Sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”, kebijakannya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.
3. Cita ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”, kebijakan terkait adalah peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu alat dalam melihat keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah dicanangkan terkait gender dalam nawacita maupun SDGs.

PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Pada tahun 2014, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) pengetahuan (*knowledge*); dan
- 3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data Susenas. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari Susenas.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi

pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

PERUBAHAN INTERPRETASI

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM.

Saat ini, IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100. Nilai IPG di bawah 100 berarti bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah laki-laki. Oleh karena IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki maka metode perhitungan IPG yang dilakukan oleh BPS pun berbeda dengan GDI yang dilakukan oleh UNDP. Hal ini disebabkan cara menghitung IPM yang berbeda dengan HDI, sedangkan menghitung IPG didahului dengan menghitung IPM.

KONSEP PEMBERDAYAAN GENDER

Konsep pemberdayaan gender lebih mengacu pada proses terbukanya kesempatan yang setara ataupun sama. Sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada *opportunity*, bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran *well-being*. Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender dalam konsep pemberdayaan adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan ketenagakerjaan yang semakin kondusif kontribusinya terhadap perempuan, menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Titik beratnya adalah seberapa besar partisipasi perempuan, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Jika IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator Pembentukan IDG

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki-laki dan perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah buruh non pertanian ; laki-laki dan perempuan

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk yang merata. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG. Selanjutnya masing-masing indeks komponen dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Indikator dalam IDG sebenarnya masih belum mencakup semua ranah kehidupan secara keseluruhan, seperti pada indikator parlemen, dianggap hanya relevan bagi negara maju (Klasen, 2006).

Kemudian pada indikator pengambilan keputusan hanya dilihat pada aspek ekonomi semata, padahal ketimpangan gender lebih banyak terjadi pada aspek non-ekonomi seperti pengambilan keputusan dalam rumah tangga (pemilihan menu makanan, pembelian alat-alat rumah tangga, pemeliharaan kesehatan anggota rumah tangga, dan pengaturan pembayaran sekolah). Metode penghitungan IDG memang masih mengacu pada metodologi lama sampai indeks ketidaksetaraan gender (IKG) bisa dihitung. Meski demikian, secara umum indeks pemberdayaan gender tetap dapat memperlihatkan capaian pemberdayaan secara gender yang ada di masyarakat.

Saat ini, penghitungan *Gender Empowerment Measure* (GEM) oleh UNDP sebagai pendekatan nilai IDG secara internasional sudah tidak dilakukan. Penghitungan GEM ini digantikan oleh *Gender Inequality Index* (GII).

BAB III

GAMBARAN UMUM GENDER DI KABUPATEN MAGELANG



KOMPOSISI PENDUDUK

Jumlah Penduduk
menurut Jenis Kelamin



657.708 Jiwa



647.804 Jiwa

KESEHATAN

Keluhan Kesehatan
Sebulan Terakhir



21,66 persen



22,67 persen

TENAGA KERJA

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja



85,14 persen



66,40 persen

KESEHATAN

Penduduk 15th Keatas
yg tamat SMP/MTs



22,72 persen



22,35 persen

<https://magelangkab.bps.go.id>



Gambaran Umum Gender

di Kabupaten Magelang

Istilah gender sangat terkait dengan paradigma yang berlaku pada masyarakat, yaitu perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang memiliki budaya patriarki, perbedaan tersebut cukup jelas terjadi di masyarakat. Pada praktiknya, perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, maupun bernegara. Diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan melalui praktik-praktik nilai-nilai budaya, sosial dan nilai-nilai kehidupan lainnya tidak dapat dihindari.

Selama ini peran publik dan domestik menjadi pembeda antara peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Laki-laki cenderung berperan dalam aktivitas publik, yaitu aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan pendapatan. Sedangkan perempuan lebih banyak dalam peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah, yaitu mengurus rumah tangga dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat selama ini. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini tidak terlepas dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga. Sementara untuk mencari nafkah keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki.

Banyak pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Disamping itu budaya patriarki yang masih kuat berkembang pada masyarakat Indonesia, terkadang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua. Salah satunya adalah kurang diakuinya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingannya belum banyak terwakili. Hal ini juga berdampak pada ketidaksetaraan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

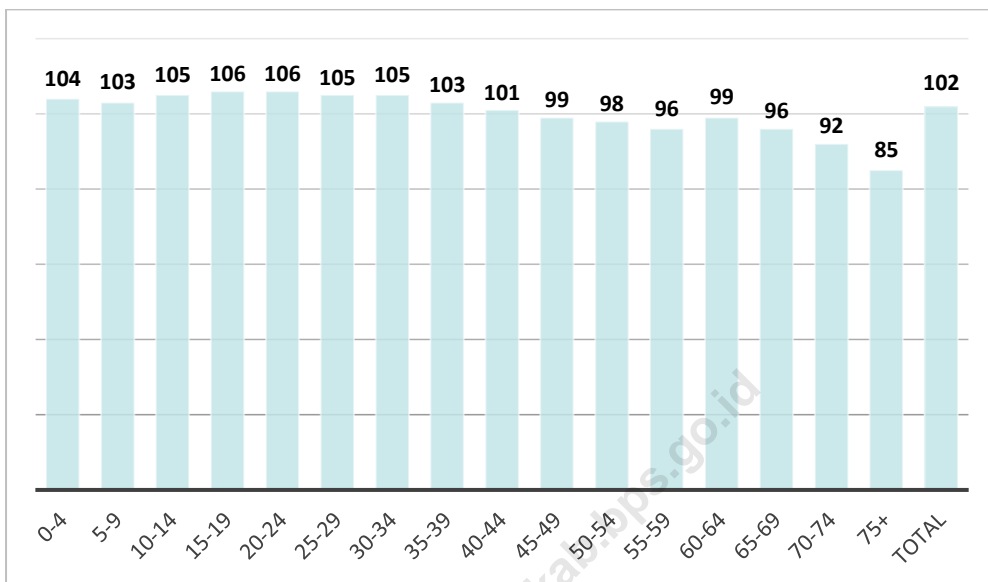
Pada perkembangannya, saat ini perempuan Indonesia sudah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Terlihat dari banyaknya perempuan yang berkarya dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena suami tidak bekerja atau menjadi orang tua tunggal. Di samping itu banyak prestasi yang diperoleh para perempuan Indonesia pada level nasional maupun internasional. Potensi yang dimiliki oleh perempuan Indonesia, tidak kalah dengan laki-laki. Semakin banyak kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk peran publik, maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Mengingat jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.

KOMPOSISI PENDUDUK

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional yang tidak hanya digunakan sebagai alat pembangunan tapi juga sebagai sasaran dalam pembangunan. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 sebanyak 657.708 jiwa, atau 50,38 persen dari penduduk Kabupaten Magelang. Sementara jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 sebanyak 647.804 jiwa, atau 49,62 persen dari penduduk Kabupaten Magelang. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Magelang sebesar 102. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan.

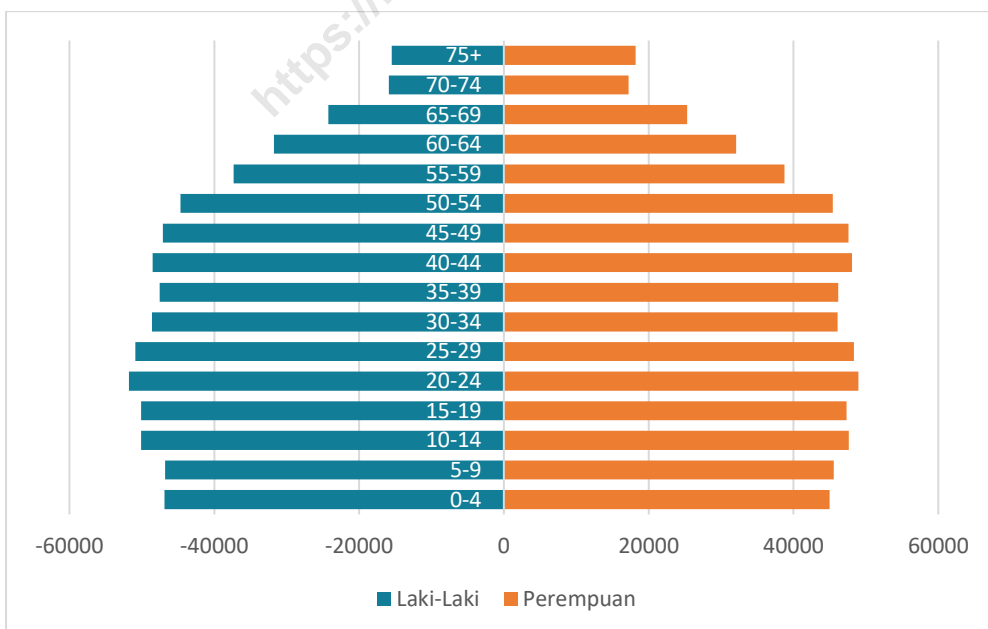
Rasio jenis kelamin kelompok umur muda menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok usia remaja hingga menjelang 40 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Pada kelompok umur yang lebih tinggi, karena umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan, maka kecenderungannya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Gambar 3.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar 3.2 Piramida Penduduk Kabupaten Magelang 2021



Sumber : Proyeksi Penduduk Interim Hasil Sensus Penduduk 2020, Kabupaten Magelang Dalam Angka 2022

KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses serta dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuangkan program kesehatan dalam RPJPD 2005-2025 dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan Angka Kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, merata serta terjangkau, dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

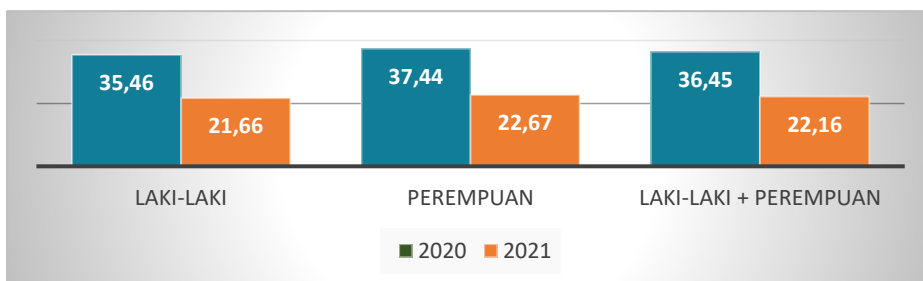
Faktor biologis dan gaya hidup mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Daya tahan perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Dari sejak masa di dalam kandungan hingga lahir, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan. Dari segi kromosom, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X yang mengandung sekitar 1100 gen, selain berperan penting dalam pengaturan hormon, kromosom X juga berperan dalam fungsi vital tubuh lainnya, sementara pada laki-laki yang memiliki kromosom Y hanya mengandung sekitar 100 gen.

Meski perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, namun secara umum perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari data keluhan kesehatan. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2021, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki. Selama kurun waktu tersebut, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan baik pada penduduk perempuan maupun laki-laki terus menurun.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir 12,97 persen wanita menderita beberapa jenis penyakit. Sementara untuk pria, persentasenya hanya sebesar 12,31 persen saja. Jack Duckett, konsumen dari *Lifestyles Analyst* di Mintel mengungkapkan jika wanita adalah sosok pribadi yang lebih rentan menderita berbagai masalah kesehatan jika dibandingkan dengan pria.

Wanita juga menjadi sosok yang mudah mengalami penurunan system kekebalan tubuh. Kenapa wanita lebih mudah sakit ini terjadi tentu bukan tanpa alasan. Jack Duckett mengungkapkan jika aktivitas wanita di rumah yang padat sekaligus perannya sebagai ibu rumah tangga membuatnya bekerja lebih giat jika dibandingkan dengan para pria. Banyak yang tidak menyadari atau memang tidak mengakui, sebenarnya pekerjaan mengurus rumah dan mengasuh anak yang dilakukan wanita tidak semudah yang dilihat dan tidak mudah. Pekerjaan ini bahkan bisa dikatakan mampu menguras tenaga dan membuat wanita rentan mengalami penurunan sistem imun tubuh, kelelahan juga rentan sakit (Fimela.com, 2016).

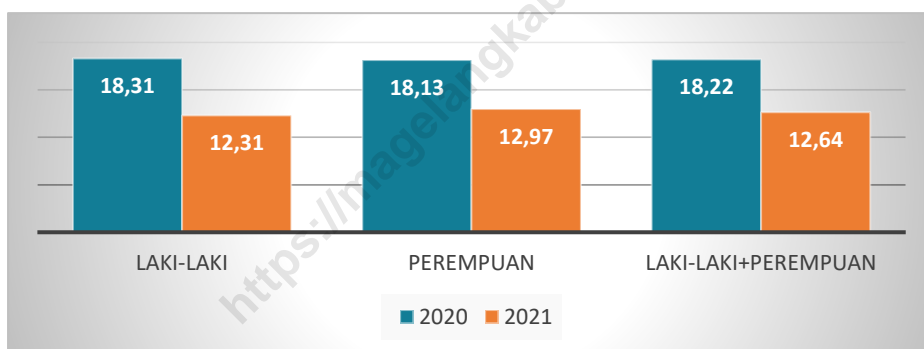
Gambar 3.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan 2021



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2020 dan 2021

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Gambar 3.4 : Angka Kesakitan Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan 2021



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2020 dan 2021

Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Magelang mencapai 12,64 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Magelang baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, diantaranya disebabkan perilaku dan gaya hidup manusia. Dikutip dari laman *dailymail.co.uk*, para ahli menemukan bahwa wanita memiliki risiko lebih besar untuk sakit jika dibandingkan dengan pria. Temuan ini bahkan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan pada beberapa wanita di Amerika Serikat. Dari beberapa ribu wanita yang diteliti, para ahli menemukan bahwa setidaknya ada 81 persen wanita yang

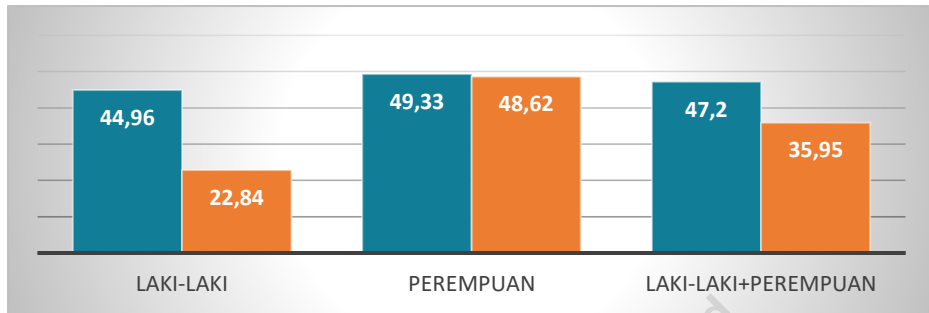
mengalami sakit kepala dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Sementara untuk pria, hanya 68 persen pria yang merasakan sakit yang sama. Studi lain juga menemukan bahwa hampir 57 persen wanita merasakan sakit punggung. Untuk pria, hanya 50 persen saja yang merasakan sakit punggung. Tak hanya sakit kepala dan punggung, studi juga menyebutkan bahwa wanita rentan terhadap sakit lain.

AKSES KESEHATAN MASYARAKAT

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan. Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan. Selain jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, derajat kesehatan penduduk tercermin dari persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Dari 22,16 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir, ternyata 35,95 persen penduduk yang berobat jalan. Dalam kurun waktu 2020-2021, penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan memiliki kecenderungan mengalami penurunan persentase yang melakukan berobat jalan. Sejalan penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan juga mengalami penurunan persentase yang melakukan berobat jalan dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 3.5 : Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021

PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Di Kabupaten Magelang, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang (Gambar 3.6). Pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (D1/D2/D3 dan S1 ke atas), persentase perempuan yang memperoleh ijazah melebihi persentase laki-laki.

Semakin berkurangnya kesenjangan pendidikan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa budaya masyarakat Jawa Tengah yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dibanding perempuan sudah mulai memudar. Namun, pada jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi persentase perolehan ijazah perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Demikian pula dengan persentase perempuan yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak memiliki ijazah, juga lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 3.1 : Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2021

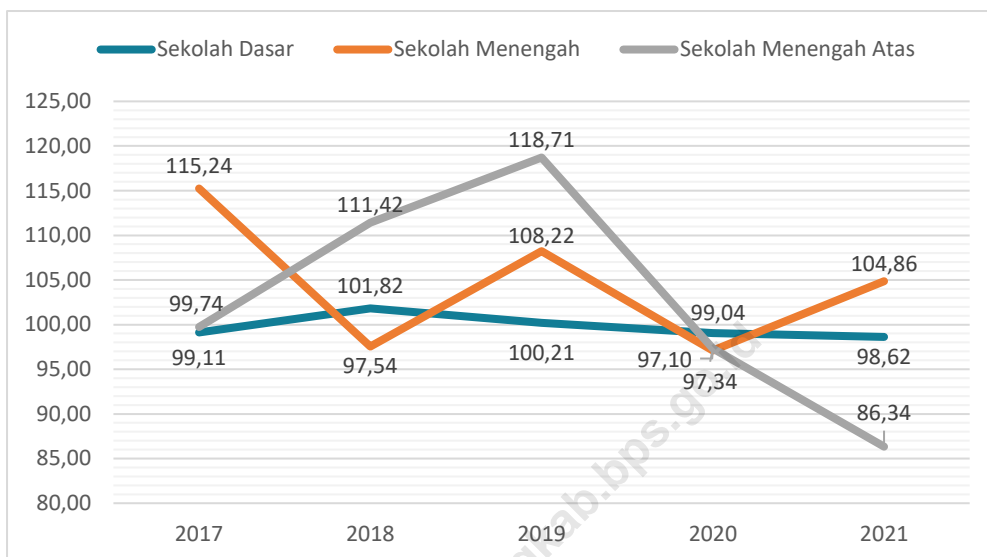
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,51	5,17	3,33
Tidak Tamat SD	13,04	16,07	14,55
SD/MI	32,16	30,31	31,24
SMP/MTs	22,72	22,35	22,54
SMA/MA	24,62	19,67	22,15
PT	5,95	6,43	6,19
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat juga dilihat dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tiga jenjang pendidikan (Gambar 3.6). APM adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Pada tahun 2021, rasio APM pada jenjang SD hingga SMA tidak selalu di atas 100, menunjukkan bahwa kesempatan perempuan untuk bersekolah pada jenjang tersebut tidak selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Meskipun rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang Pendidikan SMP lebih tinggi dibandingkan jenjang lainnya, namun rasio APM perempuan cenderung menurun selama periode 2019-2021 dari 84,31 menjadi 81,19. Sedangkan pada jenjang SMA, pada periode lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, sementara pada jenjang pendidikan SD relatif stagnan. Tingginya rasio APM pada jenjang SMP merupakan prestasi bagi perempuan Kabupaten Magelang dalam mengejar ketertinggalannya dalam aspek pendidikan pada level yang lebih tinggi.

Gambar 3.6. Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-laki di Kabupaten Magelang, Tahun 2017-2021



Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

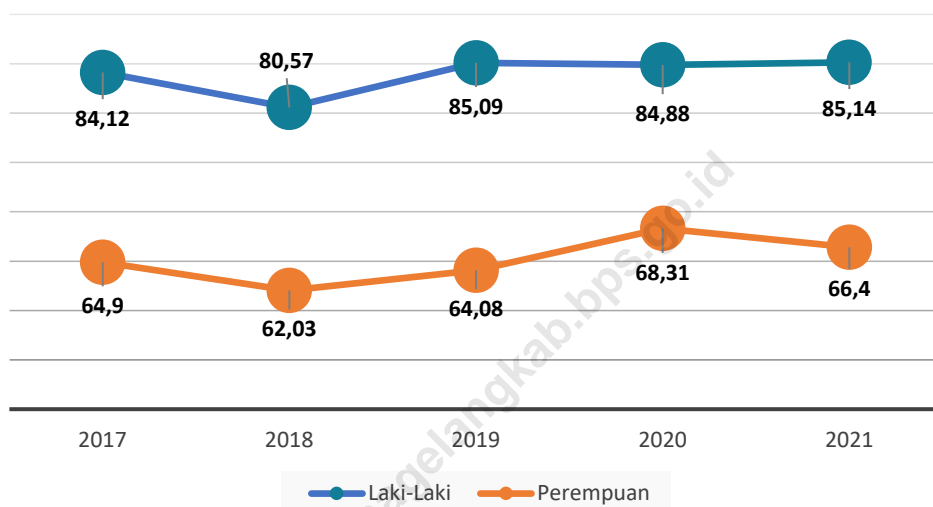
TENAGA KERJA

Dalam kehidupan bermasyarakat, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat yang menyebabkan laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja dibandingkan perempuan. Namun disisi lain, banyak juga jenis pekerjaan yang mensyaratkan dilakukan oleh perempuan karena lebih memerlukan ketelatenan dan ketelitian.

Perbedaan kesempatan kerja tersebut berdampak pada partisipasi tenaga kerja yang tercermin dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2021 angka TPAK perempuan hanya sekitar 66,40 persen, sedangkan TPAK laki-laki sudah mencapai sekitar 85,14 persen (Gambar 3.7). Angka TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Pada tahun 2021 TPAK perempuan

dan laki-laki sama-sama mengalami kenaikan, jika dibandingkan tahun sebelumnya. TPAK laki-laki mengalami kenaikan 0,26 poin, sedangkan TPAK perempuan turun 1,91 poin.

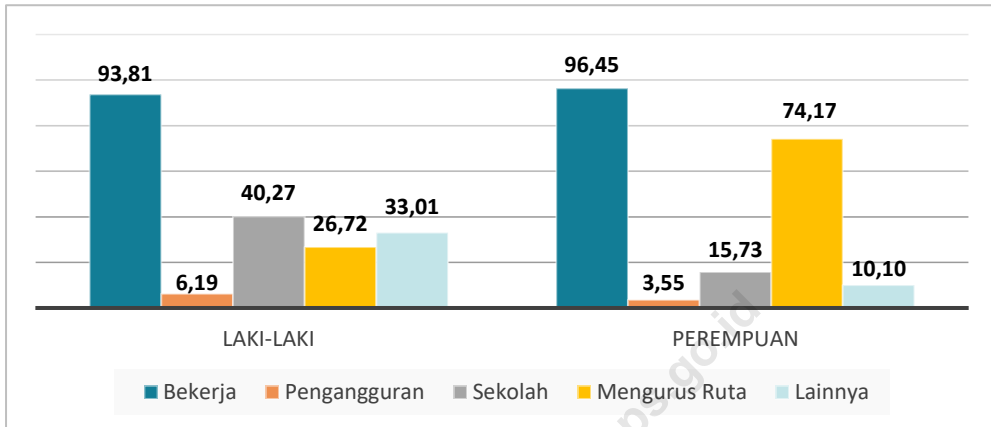
Gambar 3.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021



Sumber : Sakernas, Kabupaten Magelang Dalam Angka 2018-2022

Terlihat bahwa persentase perempuan yang bekerja masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021, proporsi perempuan yang bekerja sebesar 66,45 persen sedangkan proporsi laki-laki mencapai 85,14 persen (Gambar 3.8). Rendahnya persentase laki-laki yang bekerja dibandingkan perempuan menunjukkan sudah tidak adanya stigma pembagian peran laki-laki adalah bekerja dan perempuan adalah mengurus rumah tangga.

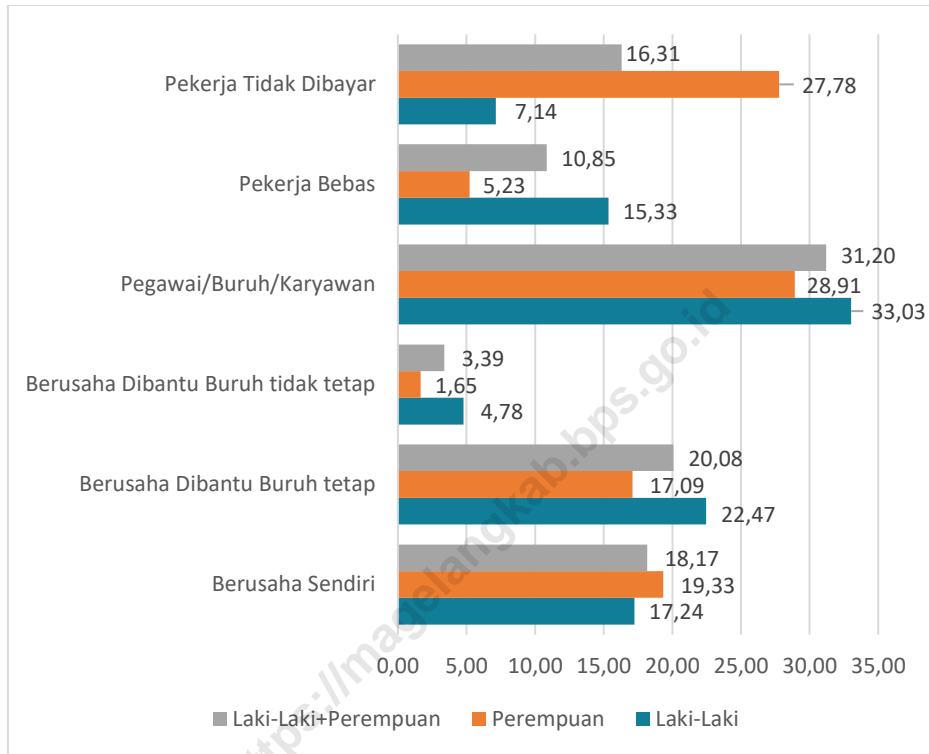
Gambar 3.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2021



Sumber : Sakernas, Kabupaten Magelang Dalam Angka 2022

Adanya kesenjangan terlihat dari status pekerjaan utama. Persentase perempuan sebagai pekerja keluarga mencapai 27,78 persen dari semua perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari persentase laki-laki yang hanya 16,31 persen (Gambar 3.9). Hal ini menunjukkan persentase perempuan yang bekerja namun tidak mendapat upah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, persentase perempuan yang bekerja sebagai pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian lebih rendah jika dibandingkan laki-laki. Namun demikian persentase perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai relatif seimbang.

Gambar 3.9 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang Agustus 2021



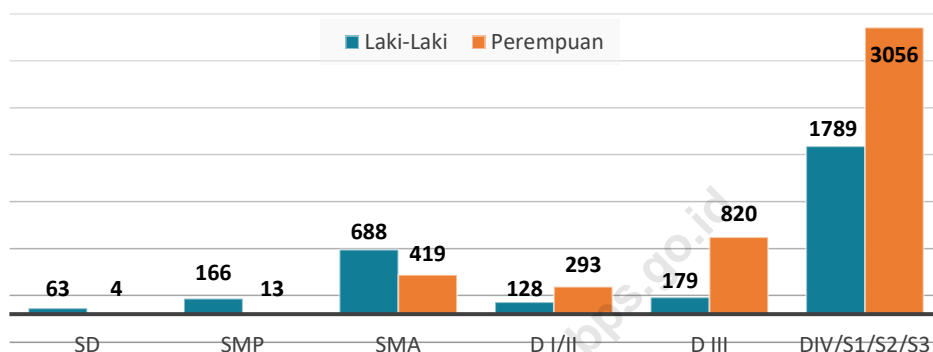
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2021

KESEMPATAN DALAM PEMERINTAHAN

Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perempuan harus mewakili aspirasinya pada lembaga legislatif. Dengan duduk pada lembaga legislatif, maka kepentingan perempuan akan mampu diperjuangkan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini menjadi salah satu indikator kesetaraan gender dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 mengenai batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen, sepertinya belum memenuhi. Bahkan pada tahun 2021, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Magelang baru mencapai 14 persen. Data Sekretariat

DPRD Kabupaten Magelang, dari 50 orang anggota DPRD, jumlah anggota DPRD perempuan hanya 7 orang.

Gambar 3.10. Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2021



Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	D I/II	D III	D IV/S1/S2/S3
Laki-Laki	63	166	688	128	179	1 789
Perempuan	4	13	419	293	820	3 056

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang Dalam Angka 2022

Di sisi lain, kontribusi perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Magelang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin tinggi. Jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki. Jika dilihat menurut pendidikannya, PNS perempuan lebih unggul dibanding PNS laki-laki (Gambar 3.10). Hal ini terlihat dari jumlah PNS perempuan dengan tingkat Pendidikan Diploma I ke atas lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki. Banyaknya jumlah PNS perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, membuktikan kesempatan untuk mendapatkan kesetaraan gender dengan laki-laki semakin tinggi pada sektor Pemerintahan. Keinginan untuk disamakan dan ikut memegang andil dalam pemerintahan tidak hanya menjadi harapan tapi juga sebagai bentuk capaian emansipasi perempuan saat ini.

Tabel 3.2. Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021

Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Fungsional Tertentu	1 671	4 031	5 702
Fungsional Umum	841	405	1 246
Struktural :			
Eselon IV	146	136	282
Eselon III	118	47	165
Eselon II	24	3	27
Eselon I	-	-	-
Jumlah	2 819	4 621	7 440

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang Dalam Angka 2022

Jabatan menjadi salah satu hal yang diinginkan bagi sebagian masyarakat. Tidak heran jika jabatan juga menentukan jenjang karir hingga pendapatan dalam sebuah pekerjaan. Jumlah PNS perempuan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi fungsional tertentu lebih banyak jika dibandingkan dengan PNS laki-laki. Sementara itu, pejabat struktural laki-laki lebih banyak dibandingkan pejabat struktural perempuan.

BAB IV

CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

IPG 91,89

**GENDER
EQUALITY**



KOMPONEN



UHH

71,99

75,73

HLS

12,54

12,96

RLS

8,32

7,30

PENGELUARAN (RIBU)

13 554

8 575

IPM

74,69

68,63



Capaian Pembangunan Gender

Kabupaten Magelang

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus

dihilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dengan demikian, perempuan akan memiliki peluang dan kesempatan dalam menggunakan sumber daya dan mempunyai akses untuk mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya tersebut.

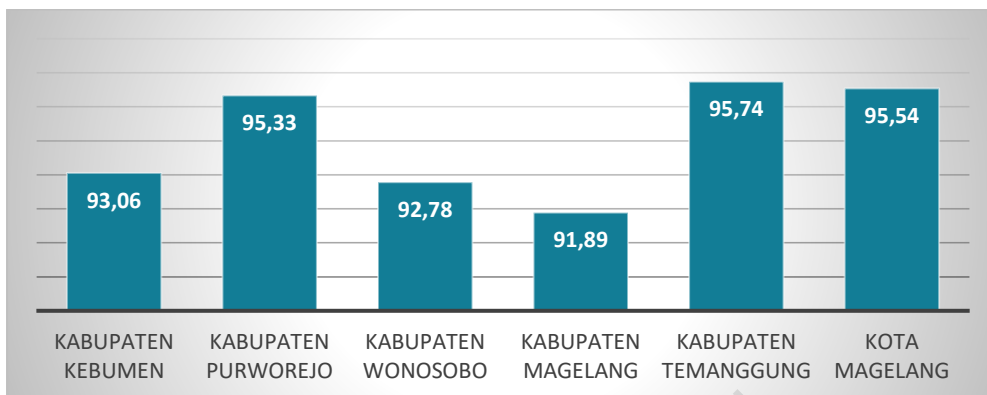
Dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender, maka perempuan di Indonesia akan mempunyai peran yang lebih besar dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). Pertama kali IPG diperkenalkan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995.

IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dari angka IPG diharapkan mampu memberikan perkembangan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Secara umum, pembangunan manusia secara kuantitatif telah digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.

IPG KABUPATEN MAGELANG DAN EKS-KARESIDENAN KEDU

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting baik dalam program nawacita maupun tujuan pembangunan berkelanjutan. Melihat keterbandingan antar wilayah dapat menjadi evaluasi sejauh mana disparitas telah diminimalisir. Disamping itu, keterbandingan antar wilayah di Indonesia juga berperan penting dalam mengukur keberhasilan di wilayah masing-masing. Semakin rendah IPG suatu wilayah, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi antara pembangunan manusia perempuan dan laki-laki.

Gambar 4.1 IPG Kabupaten Magelang di Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2021



Sumber : Jateng.bps.go.id

Di dalam lingkup Eks-Karesidenan Kedu, IPG Kabupaten Magelang berada pada urutan paling bawah. IPG tertinggi adalah Kabupaten Temanggung. Pembahasan mengenai kesetaraan gender menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Capaian pembangunan akan terlihat dari peningkatan indikator-indikator pembangunan yang berkaitan dengan gender. Perbandingan pembangunan terkait gender di Eks-Karesidenan Kedu dapat dilakukan dengan capaian pembangunan dari masing-masing komponen pembentuknya.

Tabel 4.1 Komponen IPG Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2021

Komponen IPG		Kabupaten					
		Kebumen	Purworejo	Wono sobo	Magelang	Temang gung	Kota Magelang
UHH	Laki-Laki	71,65	73,00	70,01	71,99	73,81	75,11
	Perempuan	75,41	76,69	73,84	75,73	77,57	78,82
HLS	Laki-Laki	13,34	13,65	11,73	12,54	12,12	14,44
	Perempuan	13,54	13,34	11,79	12,96	12,59	14,00
RLS	Laki-Laki	7,99	8,86	7,03	8,32	7,54	11,32
	Perempuan	7,11	7,89	6,62	7,30	7,02	10,42
PPP	Laki-Laki	11 811	11 414	14 705	13 554	11 098	13 806
	Perempuan	8 304	9 972	9 440	8 575	8 819	11 897
IPM	Laki-Laki	73,63	75,31	71,84	74,69	72,02	82,03
	Perempuan	68,52	71,79	66,65	68,63	68,95	78,37

Sumber : jateng.bps.go.id

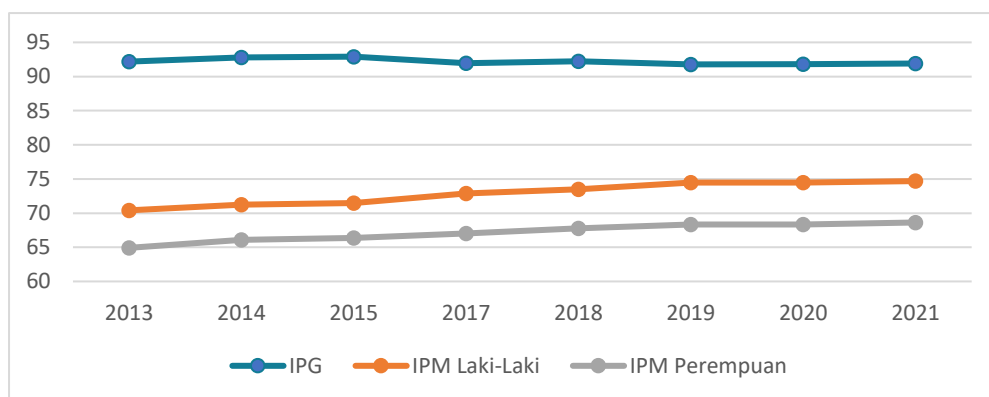
IPM Laki-laki semua kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Kedu lebih tinggi dibandingkan IPM Perempuan. IPM laki-laki di Kabupaten Wonosobo paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Kedu. Dilihat dari komponen pembentuknya, Kabupaten Magelang unggul di dimensi kesehatan.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN MAGELANG

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang tahun 2021 tercatat 91,89 meningkat dibanding IPG Kabupaten Magelang tahun 2020 yang tercatat 91,81. Penjabarannya, IPM laki-laki di Kabupaten Magelang sebesar 74,69 dan perempuan sebesar 68,63. Sejak tahun 2013 hingga 2021, IPM laki-laki di Kabupaten Magelang sudah berstatus 'tinggi' (nilainya di atas 70), sedangkan IPM perempuan sampai tahun 2021 masih berstatus 'sedang' (antara 60 sampai dengan 70). Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Magelang masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2013 hingga sekarang.

Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara tren, perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh sebanding laki-laki. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2021, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 4,28 persen, sementara perempuan 3,71 persen.

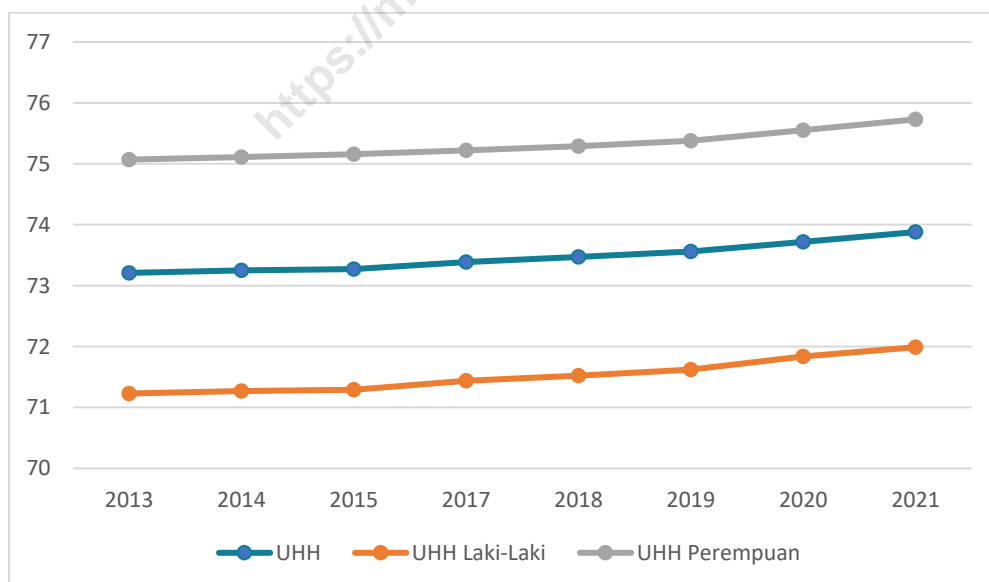
Gambar 4.2. Perkembangan IPG, IPM Perempuan dan IPM Laki-laki Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021



Sumber : jateng.bps.go.id

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Dalam jurnal Bio Essays, diketahui, kekuatan perempuan ada pada tambahan kromosom X pada perempuan. Kromosom inilah yang memberikan akses ke mikroRNA, molekul-molekul yang meregulasi protein yang dibutuhkan untuk system imunitas. Sabra Klein, profesor mikrobiologi dan imunologi molekuler di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di US menyatakan salah satu alasan perempuan secara umum memiliki respon imun yang lebih kuat ketimbang laki-laki adalah karena faktor gen dan hormon (beritasatu.com,2011). Hal inilah yang secara umum mempengaruhi umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, *female advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Gambar 4.3. Perkembangan UHH menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021

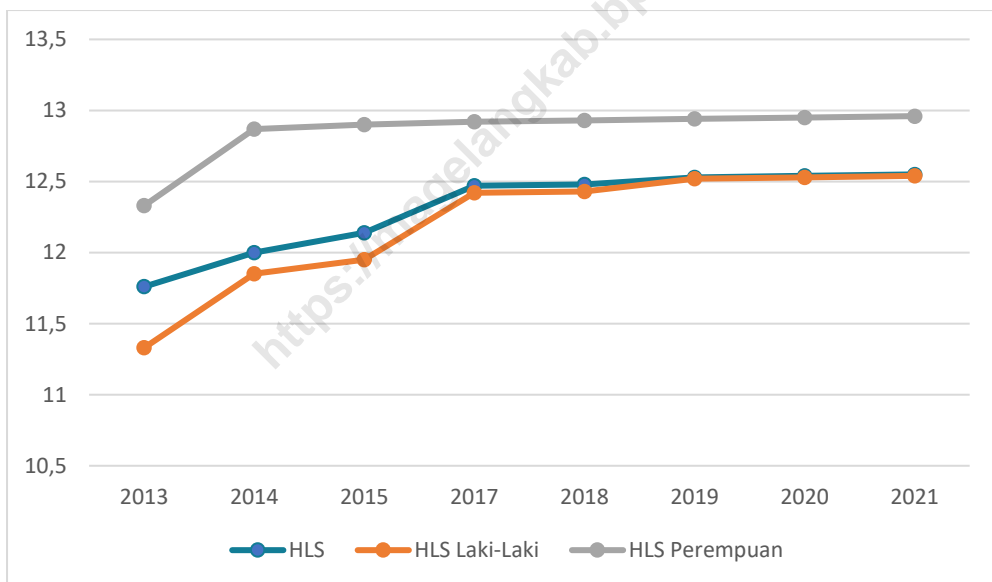


Sumber : jateng.bps.go.id

Pada tahun 2021 UHH perempuan di Kabupaten Magelang telah mencapai 75,73 tahun, sementara laki-laki mencapai 71,99 tahun. Sejak tahun 2013 nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun negara. Tingkat pendidikan yang baik akan mengarahkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan.

Gambar 4.4. Perkembangan HLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2021



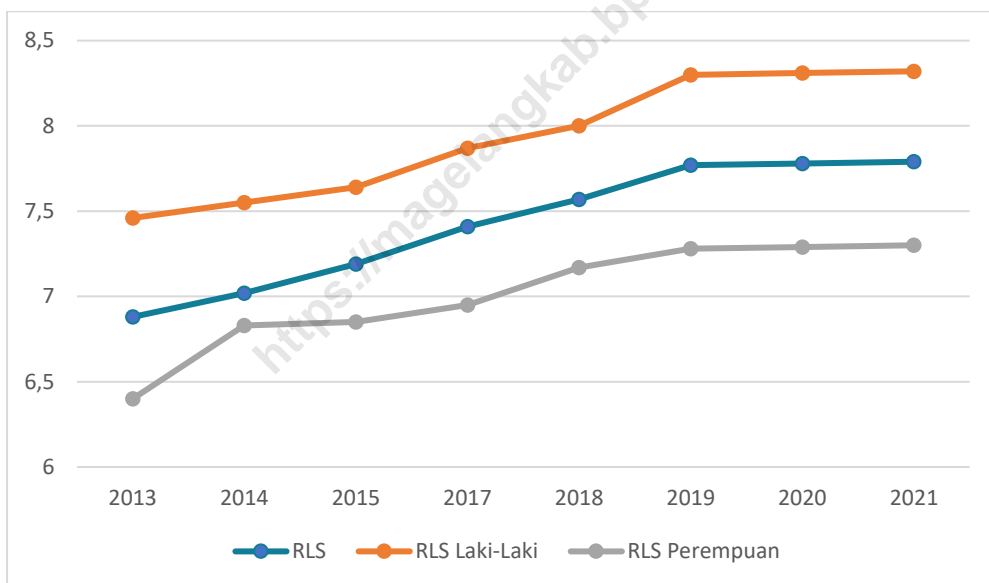
Sumber : jateng.bps.go.id

Todaro (2006) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, karena Pendidikan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan juga memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan (Sri Endang, 2010).

Salah satu statistik yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun keatas. HLS juga menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan. Pada tahun 2021 HLS perempuan adalah 12,96 tahun dan laki-laki sebesar 12,54 persen. Dengan nilai pencapaian tersebut, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan telah dapat diwujudkan secara merata.

Gambar 4.5. Perkembangan RLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021

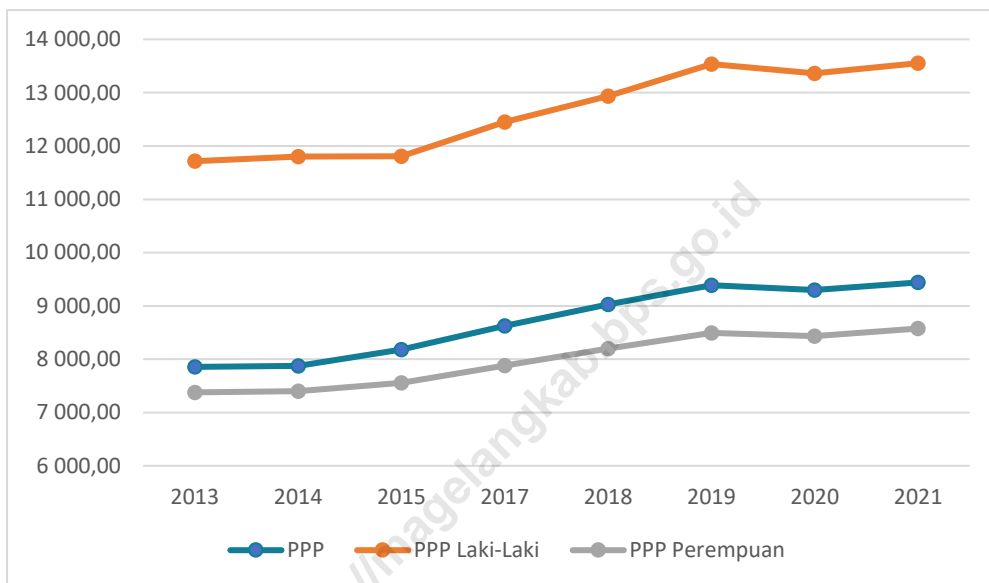


Sumber : jateng.bps.go.id

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2021 rata-rata pendidikan laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan. Pada

tahun 2021, rata-rata pendidikan yang dijalani oleh laki-laki adalah sekitar 8,32 tahun, sedangkan perempuan 7,30 tahun.

Gambar 4.6. Perkembangan Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021



Sumber : jateng.bps.go.id

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukkan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan perkapita. Namun karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan perkapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebagai proksi.

Selama periode 2013 hingga 2021, nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (Gambar 4.6). Pada tahun 2021 pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan adalah sebesar 8.575 ribu rupiah, sedangkan pengeluaran perkapita yang disesuaikan laki-laki adalah sebesar 13.554 ribu rupiah. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di

lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalan, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi.

CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN/KOTA SE-EKS KARESIDENAN KEDU

Tabel 4.2. Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kedu menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Kabupaten/Kota	IPM Laki-Laki	IPM Perempuan	IPM
Kebumen	Tinggi	Sedang	Tinggi
Purworejo	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Wonosobo	Tinggi	Sedang	Sedang
Magelang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Temanggung	Tinggi	Sedang	Sedang
Kota Magelang	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : jateng.bps.go.id

Dari semua kabupaten/kota di eks-karesidenan kedu, IPM laki-laki berstatus tinggi bahkan Kota Magelang IPM Laki-Laki berstatus sangat tinggi. Berbeda dengan IPM perempuan yang hanya berstatus tinggi di Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian pembangunan manusia di eks-karesidenan kedu secara keseluruhan telah mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2021 tidak ada kabupaten/kota yang berada pada kategori rendah.

Capaian perbandingan antara pembangunan perempuan dan laki-laki tercermin dari indeks pembangunan gender (IPG). Pada tahun 2021, IPG tertinggi dicapai oleh Kabupaten Temanggung diikuti oleh Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten wonosobo dan terakhir adalah Kabupaten Magelang.

Tabel 4.7 Angka IPG dan IPM Menurut Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2021

Kabupaten/Kota	IPM	IPG
Kebumen	70,05	93,06
Purworejo	72,98	95,33
Wonosobo	68,43	92,78
Magelang	70,12	91,89
Temanggung	69,88	95,74
Kota Magelang	79,43	95,54

Sumber : Jateng.bps.go.id

Kesetaraan gender ditunjukkan oleh angka IPG yang mendekati 100, karena dalam penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan IPM perempuan dibanding IPM laki-laki. Di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung kesetaraan gendernya sudah sangat baik yang terefleksi dari angka IPG yang tinggi, namun dalam pencapaian pembangunan manusianya masih kurang.

BAB V

CAPAIAN PEMBERDAYAAN GENDER DI KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

IDG 69,64

**GENDER
EQUALITY**



KOMPONEN



PERSENTASE
KETERLIBATAN DI
PARLEMEN

86

14

PERSENTASE
TENAGA MANAGER,
PROFESIONAL,
ADMINISTRASI, TEKNISI

44,37

55,63

SUMBANGAN DALAM
PENDAPATAN KERJA

62,18

37,82



Capaian Pemberdayaan Gender

Di Kabupaten Magelang

Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengukur pemberdayaan diantaranya: partisipasi dalam pendidikan, dalam dunia kerja, serta partisipasi dalam jabatan publik.

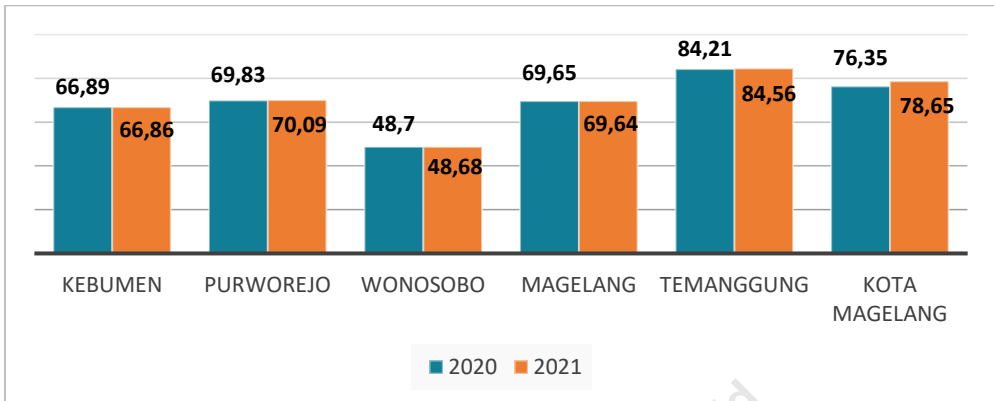
Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang disusun oleh UNDP.

IDG KABUPATEN MAGELANG DAN EKS-KARESIDENAN KEDU

Posisi IDG Kabupaten Magelang pada tahun 2021 sebesar 69,64 berada di nomor empat di eks-karesidenan kedu. IDG tertinggi yakni Kabupaten Temanggung yang disusul oleh Kota Magelang. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Wonosobo.

IDG Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mengalami penurunan 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Kabupaten lain yang juga mengalami penurunan IDG antara lain Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo.

Gambar 5.1. IDG Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2021

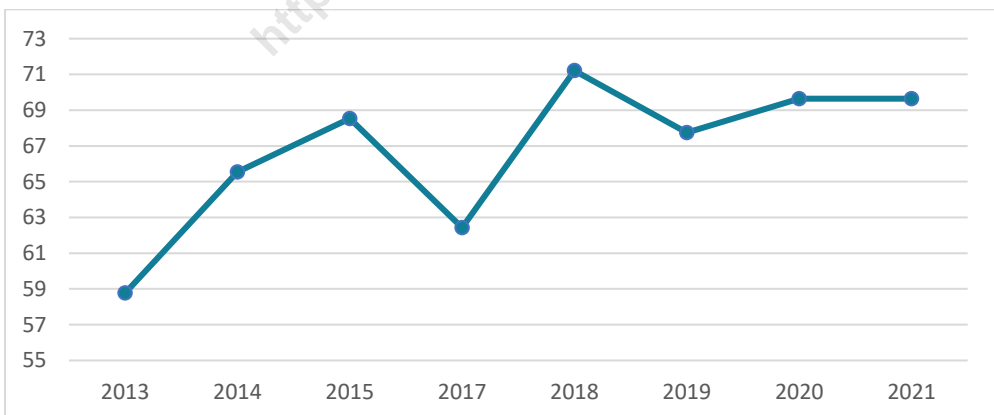


Sumber : jateng.bps.go.id

PERKEMBANGAN PEMBERDAYAAN GENDER DI KABUPATEN MAGELANG

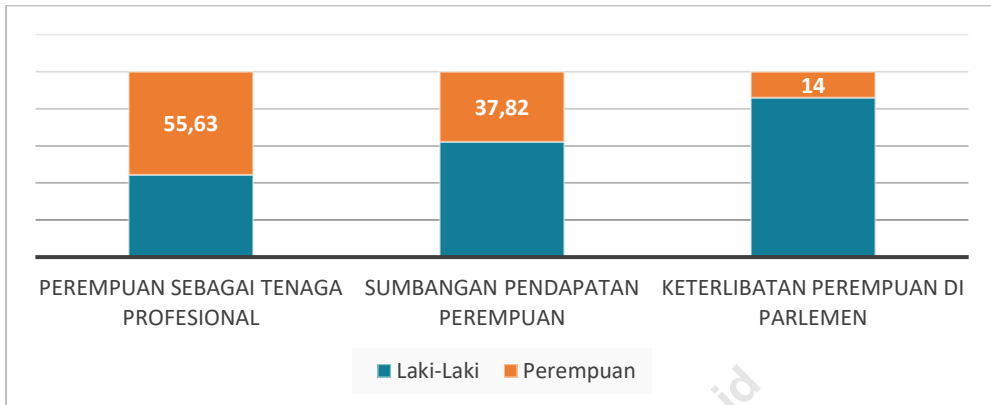
Pemberdayaan gender di Kabupaten Magelang tidak selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, 2019, dan tahun 2021 mengalami penurunan. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5.2 IDG Kabupaten Magelang Tahun 2013-2021



Sumber : jateng.bps.go.id

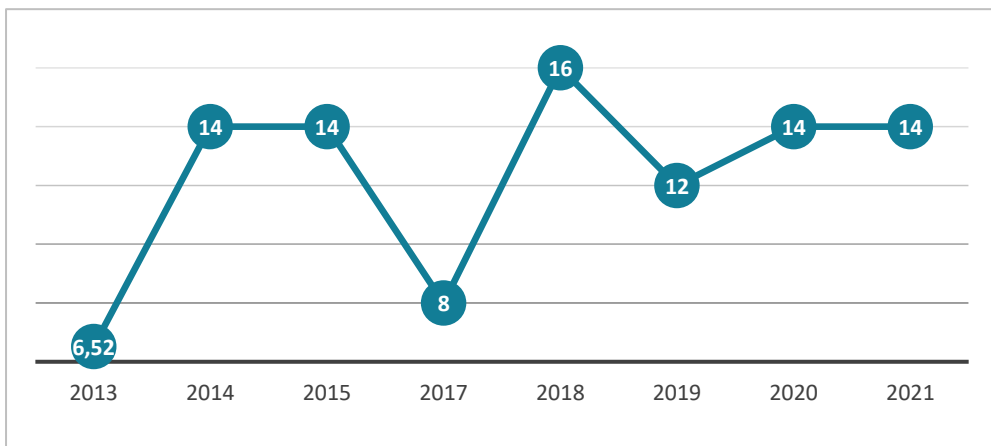
Gambar 5.3. Komponen IDG di Kabupaten Magelang Tahun 2021



Sumber : jateng.bps.go.id

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai.

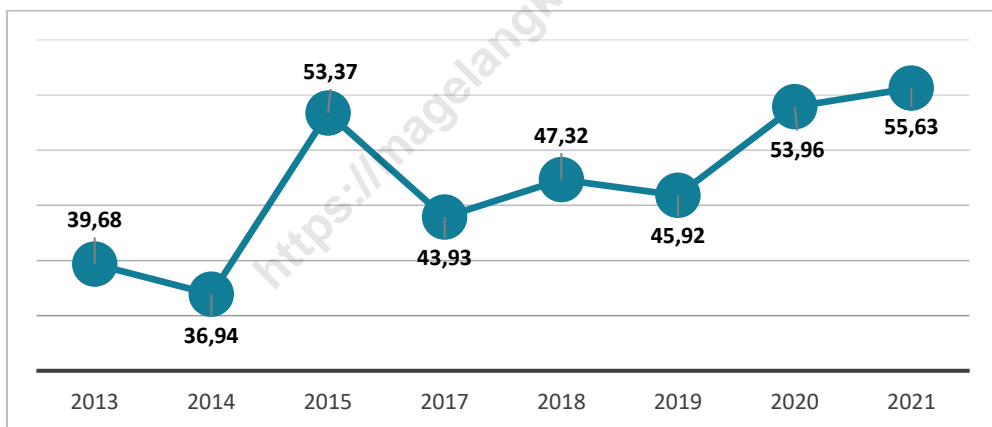
Gambar 5.4. Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2021



Sumber : jateng.bps.go.id

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia (BPS, 2018). Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen yang selalu meningkat ini berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik di level nasional maupun daerah.

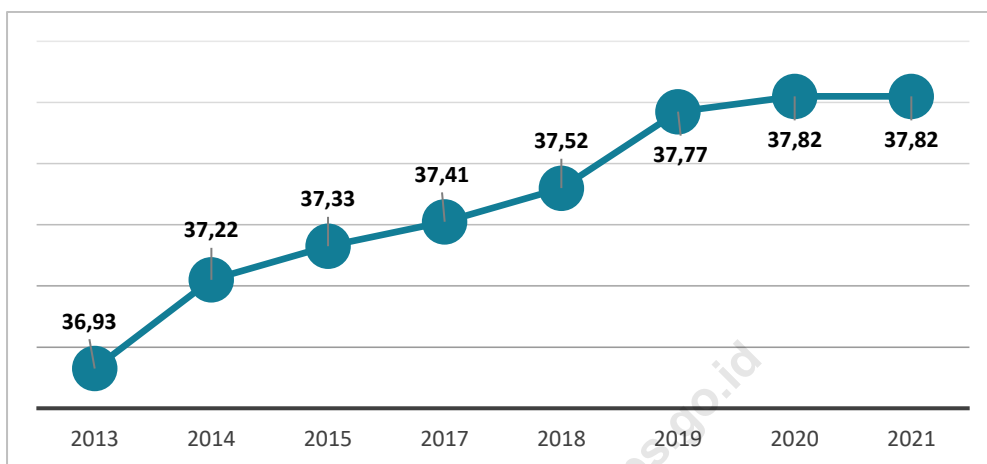
Gambar 5.5. Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2021



Sumber : jateng.bps.go.id

Tahun 2011 hingga tahun 2021, persentase perempuan sebagai tenaga profesional seperti manager, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan fluktuasi. Sejak tahun 2020 terlihat peran perempuan sebagai tenaga profesional seperti manager, profesional, administrasi dan teknisi lebih tinggi dibandingkan peran laki-laki. Hal ini menunjukkan peran perempuan dan laki-laki sebagai tenaga profesional semakin seimbang.

Gambar 5.6. Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2021



Sumber : jateng.bps.go.id

Kesetaraan gender menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender diwujudkan dengan penetapan program pengarusutamaan gender (PUG). PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pengarusutamaan gender dilaksanakan baik di level pusat maupun daerah. Melalui pelaksanaan PUG, diharapkan dapat meningkatkan capaian kesetaraan gender antarwilayah secara merata.

Pemberdayaan gender erat kaitannya dengan pembangunan gender. Pemberdayaan gender terjadi ketika perbaikan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi berhasil mendorong terwujudnya pemberdayaan (Cinar, 2018). Idealnya, peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Selama ini, perempuan cenderung tertinggal di berbagai peran seperti ekonomi tenaga kerja dan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh mengakarnya budaya patriarki. Seiring dengan meningkatnya kualitas perempuan antarwaktu, yang ditandai dengan

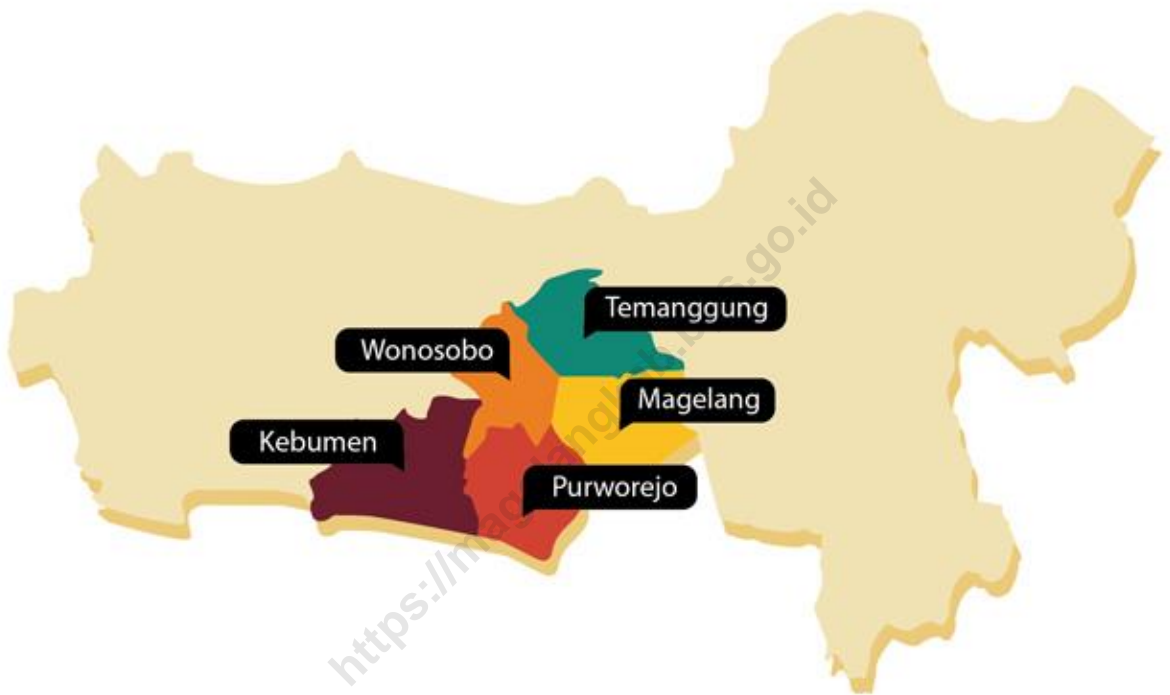
peningkatan IPG, pemberdayaan yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat terwujud.

Keterkaitan antara IPG dan IDG menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, wilayah dengan tingkat pembangunan gender yang tinggi akan memiliki tingkat pemberdayaan gender yang tinggi pula, begitupun sebaliknya.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB VI

KESIMPULAN



IPM Kabupaten Magelang
berstatus **TINGGI**
dan
IPG Kabupaten Magelang
berada pada urutan terakhir
dalam Eks-Karesidenan Kedu





Kesimpulan

Gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada factor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indicator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IPG Kabupaten Magelang pada tahun 2021 tercatat sebesar 91,89 meningkat sebesar 0,08 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun nilai IPG meningkat, namun masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Magelang. Sejak tahun 2013 IPM laki-laki di Kabupaten Magelang sudah berstatus 'tinggi' (nilainya diatas 70). Sedangkan IPM perempuan sampai tahun 2021 masih status

sedang. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Magelang masih berada dibawah angka 100 sampai tahun 2021.

Di lingkup eks-karesidenan kedu, IPG Kabupaten Magelang berada pada urutan terakhir. Namun IPM Kabupaten Magelang berada pada urutan ke tiga. IPM ditinjau berdasarkan gender, seluruh kabupaten/kota di eks-karesidenan kedu ipm laki-laki berstatus tinggi dan sangat tinggi, berbanding terbalik dengan IPM perempuan hanya Purworejo dan Kota Magelang yang berstatus tinggi, kabupaten/kota yang lain berstatus sedang.

IDG Kabupaten Magelang berada pada urutan ke 4 di eks-karesidenan kedu. IDG tertinggi adalah Kabupaten Temanggung dan IDG terendah adalah Kabupaten Wonosobo.

<https://magelangkab.bps.go.id>



Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah

<https://jateng.bps.go.id/>

<https://magelangkab.bps.go.id/>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno - Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511
Telp./Fax. (0293) 788143. E-Mail : bps3308@bps.go.id
Homepage: <https://magelangkab.bps.go.id/>